

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985 *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997 *Naskah Akademis Peraturan perundangundangan tentang Perjanjian BOT*, Jakarta
- E.R Yescombe, 2007, *Public-Private Partnership: Principles of Policy and Finance*, Cet. 1, Oxford: Butterworth-Heinemann
- Herman A. Carel Lawalatta, 1981, *Pelabuhan dan Niaga Pelayaran*, Aksara Baru, Jakarta.
- Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama*, Yogyakarta.
- Indra Surya, 2006 *Penerapan Good Corporate Governance, mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana Prenada Media Group
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, :PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2010, *Tatanan Kepelabuhanan Nasional*, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT.Alumni, Bandung.
- Marcus Jefferies, *Critical Success factor of public private partnership, A case study of the Sydney superdome.*
- Purwahid Patrik, 1984 *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus besar bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, cet I*, Balai Pustaka,, Jakarta

- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata Alumni*, Bandung
- R. Subekti, 2001, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik dan Praktik Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Wiwoho Soedjono, 1983, *Sarana-sarana Penunjang Pengangkutan Laut*, Bina Aksara, Jakarta
- Wiwoho Soedjono, 1983, *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara*, Bina Aksara, Jakarta
- Whisnoe Junaidy, 2002, *Hukum Perikatan*, Diktat bahan Kuliah, Pasca Sarjana FH- UGM Yogyakarta
- Yescombe ER. 2007. *Public Private Partnerships : Principles of Policy and Finance. 1st edition*, Elsevier Ltd
- Ye S.D, Tiong R.L.K. 2003, “*The effect of concession period design on completion risk management of BOT projects*”, *Journal Construction Management and Economics*, Vol. 21, No.5
- Zhang X, 2009, “*Win-Win Concession Period Determination Methodology*”, *Journal of Construction Engineering and Management*, Vol. June
- Zhang XQ, 2001, *Kumaraswamy MM. Hong Kong experience in managing BOT projects. J Constr Eng Manage ASCE*

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, LN No 75 Tahun 1959.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

\_\_\_\_\_, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti dan R Tjitrosudibio. Cet. 31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, (Lembaran Negara Nomor 151 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5070).

Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur

\_\_\_\_\_, Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2012)

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015).

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 38 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 633 Tahun 2012)

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia  
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama  
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

### **3. Internet**

[www.indonesiaport.co.id](http://www.indonesiaport.co.id)

[www.hubla.go.id](http://www.hubla.go.id)

[www.beritatrans.co.id](http://www.beritatrans.co.id)

[www.portdevco.com](http://www.portdevco.com)